



## Polres Intensifkan Penyidikan Kasus LPD Suwat Sekretaris LPD Dicecar 123 Pertanyaan

**Pertanyaan terkait aliran dana LPD, dana yang diambil pengurus, dan kemana aliran dana tersebut.**

GIANYAR, NusaBali

Mantan Sekretaris LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Suwat, Kecamatan/Kabupaten Gianyar, NN, 32, diperiksa tim penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polres Gianyar, Selasa (26/7). NN dimintai keterangan terkait kasus kredit fiktif LPD Suwat. Penyidik mencecar NN dengan 123 pertanyaan.

NN didampingi penasihat hukumnya, I Gede Narayana SH

MH, tiba di Polres Gianyar pukul 11.00 Wita. Di sela-sela pemeriksaan itu, Narayana mengungkapkan hingga Selasa kemarin, kliennya masih berstatus sebagai saksi. Ia mengakui, penyidik memberikan pertanyaan hingga 123 pertanyaan kepada NN. Pertanyaan yang diajukan terkait aliran dana LPD, dana yang diambil oleh pengurus dan kemana arah dana tersebut. Kata dia, kliennya mengalirkan dana kepada pihak yang menerima sesuai perintah ketua LPD. Kliennya juga sebatas melakukan pencatatan, namun tidak tahu pasti proses penarikan dana itu. "Klien saya tidak tahu menahu tentang kredit fiktif. Ia hanya mengikuti desakan dari ketua," jelas Narayana.

Kata Narayana, pengeluaran dana LPD oleh ketua juga tanpa koordinasi sekretaris, sehingga

sekretaris tidak tahu pasti arah dana tersebut. Pemeriksaan NN berakhir pukul 15.00 Wita. Pemeriksaan ini masih akan berlanjut sesuai kebutuhan penyidik.

Seizin Kapolres Gianyar AKBP Waluya SH, Kanit Idik III Unit Tindak Pidana Korupsi IPTU Reza Pranata SIK saat dikonfirmasi membenarkan pemanggilan mantan sekretaris LPD Suwat untuk menjalani pemeriksaan. "Kami masih melakukan pemeriksaan, dan ini masih berlanjut," jelasnya singkatnya.

Kasus kredit fiktif LPD Desa Pakraman Suwat berawal dari Ketua LPD Suwat, RY, 47, Sekretaris LPD NN, 32, dan Bendahara, MS, 44, mengelola dana awal Rp 10 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar. Ketiga pengurus LPD ini diduga membuat kredit fiktif 40 nama



• NUSABALI/EKA SRI

Penasihat Hukum I Gede Narayana SH MH (kanan) saat berbicara dengan penyidik Unit III Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polres Gianyar, Selasa (26/7).

dengan nama karangan. Pada 2010 pengurus melakukan pengalihan data administrasi manual ke komputer dan ditemukan selisih tabungan Rp 68,

4juta. Dana LPD berkembang hingga total pinjaman fiktif mencapai Rp 687,5 juta. Total kerugian LPD atau masyarakat Rp 871.942.500. cr62

Edisi : Rabu, 27 Juli 2016

Hal : 6



## Kasus Korupsi DED PDAM Gianyar Namanya Disebut, Widarma Siap Dipanggil Penyidik

GIANYAR, NusaBali

Mantan Badan Pengawas PDAM Gianyar yang kini Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gianyar, Gede Widarma Suharta menyatakan siap bila dipanggil penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar terkait laporan mantan Direktur Teknik (Dirtek) PDAM, I Nyoman Nuka. Nyoman Nuka sendiri bersama Dewa Putu Djati (mantan Dirut PDAM Gianyar) dan Dewa Nyoman Putra (mantan Direktur Umum PDAM Gianyar), telah jalani hukuman berdasarkan putusan kasasi MA terkait kasus penyelewengan pembuatan detail engineering design (DED) PDAM Gianyar senilai Rp 2,6 miliar. Nuka dan Putra divonis 4 tahun dan Dewa Putu Djati divonis 5 tahun. Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, ketiganya sempat divonis bebas.

Ditemui *NusaBali*, Selasa (26/7) Gede Widarma mengungkapkan dirinya tidak permasalahan dilaporkan oleh Nyoman Nuka. Apa yang dilakukan Nyoman Nuka merupakan hak pribadinya. "Saya hormati hak orang untuk berbicara," ungkapnya. Dijelaskan Widarma dirinya menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas sejak bulan Juli 2012 sampai bulan Oktober 2013. Sedangkan kasus penyelewengan terkait pembuatan detail engineering design (DED) PDAM Gianyar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,6 miliar, sudah bergulir ketika dirinya baru masuk PDAM. Proyek DED dilaksanakan oleh Direksi PDAM pada tahun anggaran 2010 dan proyek ini berakhir pada Desember 2010.

Widarma menambahkan Badan Pengawas bertugas melakukan pengawasan ter-

hadap kelembagaan dan keuangan PDAM. "Setahu *tiyang* (saya) untuk pengawasan keuangan di PDAM sudah dilakukan oleh BPKP Provinsi Bali," jelasnya. Jika ada yang tidak sesuai ketentuan, Badan Pengawas memberikan teguran lisan/tertulis, jika ada kasus, tentunya yang bertanggung jawab adalah yang melaksanakan perbuatan tersebut.

Bila nantinya akan diundang oleh penegak hukum, Widarma menegaskan dirinya sudah siap, dan akan memberikan informasi yang diketahuinya. "Saya akan menyampaikan sejauh mana yang saya ketahui," tegasnya. Dirinya mengaku tidak mengerti kenapa namanya disebut-sebut dan dikaitkan dalam kasus ini. Meski demikian Widarma akan mengikuti perkembangan selanjutnya.

Seperti diberitakan sebelum dijebloskan ke Rutan Gianyar, salah satu terpidana, yakni mantan Dirtek PDAM Gianyar, Nyoman Nuka sempat melaporkan mantan Ketua Badan Pengawas (BP) PDAM Gianyar, I Gede Widarma Suharta, yang dituding terlibat dalam kasus ini. Versi Nyoman Nuka, Widarma Suharta yang kini menjabat Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gianyar itu, ikut andil dalam kasus korupsi pembuatan Detail Engineering Design (DED) PDAM Gianyar, perencanaan proyek pipanisasi mata air Geroh dan Bayad, serta tunjangan pegawai harian di PDAM Gianyar 2009-2012. Kasi Intel Kejari Gianyar, Ketut Sudiarta, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan terpidana Nyoman Nuka tersebut. "Laporan itu masih kami dalam," jelas Sudiarta, Senin lalu. cr62

Edisi : Rabu, 27 Juli 2016

Hal : 5



## Dana Pilgub Bali Dianggarkan Bertahap

★ Dewan Nilai Anggaran dengan Asumsi 6 Paket Calon Tak Masuk Akal

Ketua KPU Bali, Raka Sandhi menegaskan pihaknya tidak berasumsi, namun melakukan perencanaan dengan data terkait usulan anggaran.



Putu Jaya Suartama

DENPASAR, NusaBali

Pemprov Bali tidak mampu menyediakan anggaran sekaligus dalam setahun untuk Pilgub Bali yang diusulkan KPU Bali senilai Rp 254 miliar. Dana Pilgub Bali yang akan digelar pada 2018 mendatang itu akan dicicil setiap tahun dalam APBD Provinsi Bali 2016 (perubahan), APBD 2017 dan APBD 2018. Sementara DPRD Bali menilai anggaran Pilgub Bali dengan asumsi dua putaran dengan enam paket calon dinilai tidak masuk akal.

Kepala Kesbanglinmaspol Provinsi Bali, Putu Jaya Suartama di Denpasar, Selasa (26/7) mengatakan KPU Bali telah mengajukan permohonan anggaran Rp 270 miliar. Namun dalam pembahasan dengan Tim Anggaran dan Pembangunan Daerah (TPAD) jumlahnya dirasionalisasi menjadi Rp 254 miliar. Nah, penganggaran tersebut dipastikan akan dicicil.

"Dengan kondisi keuangan Pemprov Bali sekarang dengan berbagai kebutuhan yang

ada, tidak bisa sekaligus. Kami harus cicil," ujar Jaya Suartama. Kata Jaya Suartama saat ini Pemprov Bali mendapatkan tambahan beban dalam pembiayaan, seperti adanya keharusan penganggaran untuk SMA/SMK yang dialihkan ke Provinsi. "Belum lagi program-program lain yang membutuhkan banyak anggaran. Kami di Pemprov Bali jelas harus cicil dana Rp 254 miliar itu. Mungkin dipasang awal pada tahun 2016 pada APBD Perubahan, lanjut di APBD 2017 Induk dan pada APBD Induk 2018. "Ya bertahaplah kita anggar," tegas Jaya Suartama.

Anggaran yang diajukan KPU Bali apakah rasional atau tidak, kata Jaya Suartama yang tahu adalah KPU Bali. KPU Bali berasumsi anggaran Rp 254 miliar dengan dua kali putaran dan kandidatnya ada 6 pasang. "Yang tahu itu kan KPU, bukan kami. Yang membahas dan merasionalisasi TPAD Pemprov. KPU asumsikan Pilgub 2 putaran dan 6 paket calon sehingga untuk biaya logistik,

terutama kertas suara lumayan juga," ujar mantan ajudan Gubernur Ida Bagus Oka ini.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Bali membidangi hukum dan politik, I Ketut Tama Tenaya secara terpisah mengatakan dana senilai Rp 254 miliar itu sebenarnya masih bisa dirasionalisasi dan dicitutkan lagi. Secara terpisah, Tama Tenaya menyebutkan asumsi KPU Bali dengan 6 pasangan calon di Pilgub Bali kecil kemungkinan terjadi. "Walaupun dengan calon independen juga, rasanya tidak mungkin ada 6 paket calon. Apalagi persyaratan suara mengusung calon itu 20 persen lho. Kita bisa rasionalisasi lagi dananya itu. Bisa diturunkan lagi," ujar Tama Tenaya sembari mengatakan pihaknya akan segera *hearing* dengan KPU dan Pemprov Bali.

Apalagi kata politisi PDIP asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung ini, pada Pilgub Bali 2018 nanti akan bersamaan dengan Pilkada Gianyar dan



Sambungan ---

### RASIONALISASI ANGGARAN PILGUB BALI 2018

- Rancangan Anggaran Awal sebesar Rp 270 miliar
- Rancangan anggaran setelah dirasionalisasi KPU bersama Tim Anggaran dan Pembangunan Daerah (TPAD) Prov Bali sebesar Rp 254 miliar
- Rancangan anggaran pasca rasionalisasi menyusut Rp 16 miliar
- Rancangan anggaran Bawaslu juga menyusut dari Rp 73 miliar menjadi Rp 68 miliar.

### ITEM ANGGARAN YANG DIRASIONALISASI

- Pilkada serentak (Pilgub Bali, Pilkada Gianyar dan Pilkada Klungkung 2018), sehingga akan ada *sharing* anggaran.
- Biaya kampanye tidak hanya didanai KPU, tapi ditanggung bersama dengan pasangan calon.
- Logistik dan biaya-biaya rapat juga diefisiensi.
- Pembuatan TPS yang dulu banyak sewa, dirancang tidak ada biaya sewa lagi.

Pilkada Klungkung. "Pasti ada *sharing*. Ini juga kami akan cek dan harus dipantau. Bisa *double* anggaran nanti dan ada persoalan," tegas mantan Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali ini.

Kalau Pilgub 2018 diasumsikan 2 putaran? "Kalau dua putaran masuk akal. Itupun kalau luar biasa. Di mana pasangan calon bisa lolos 4 pasang. Kemungkinan terjadi dua putaran. Kalau 6 pasangan kami menilai tidak masuk. Kalau kebutuhan logistik dengan paket yang minimal kan lumayan efisiensi," tegas Tama Tenaya.

Sementara Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi yang dikonfirmasi *NusaBali* mengatakan pihak KPU bekerja sesuai dengan aturan dalam merencanakan anggaran Pilgub Bali. "Pola ini sudah diterapkan ketika Pilgub sebelumnya. Kami tidak mau ambil risiko seperti di daerah lain. Tidak direncanakan paket calonnya, beberapa putaran juga tidak direncanakan, tetapi ternyata terjadi di luar dugaan.

Ini berat juga nanti," ujar Raka Sandhi.

Raka Sandhi sendiri menegaskan pihaknya tidak berasumsi. Namun melakukan perencanaan dengan data. "Kami bukan berasumsi, tetapi kami berusaha melakukan perencanaan dengan data. Segala aspek kita antisipasi. Nanti kalau ternyata dana yang disiapkan ada tidak terpakai otomatis dia menjadi sisa dan dikembalikan kepada kas daerah," ujar alumni GMNI Bali ini.

Sebelumnya diberitakan Pilkada serentak 2018 berdampak dengan anggaran yang dirancang KPU Bali. Anggaran Pilgub Bali 2018 menyusut Rp16 miliar. Anggaran yang sebelumnya diusulkan Rp 270 miliar, menurun menjadi Rp 254 miliar. Penyusutan anggaran itu terjadi terkait sejumlah kegiatan yang bisa diefisienkan. Sedangkan jika dibandingkan anggaran Pilgub Bali 2013 lalu yang sebesar Rp 133 miliar, anggaran Pilgub Bali 2018 meningkat jauh, hampir 100 persen. **nat**